



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SJAFRIE SJAMSOEDDIN
NIK : 3175053010520001
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : PIMPINAN TERTINGGI
Sub Unit Kerja : KEPALA LEMBAGA
Jabatan : MENTERI PERTAHANAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 6 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SJAFRIE SJAMSOEDDIN**
2. Jabatan : **MENTERI PERTAHANAN**
3. NHK : **25260**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **99.653.705.000**

1. Tanah Seluas 80.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 12.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 867 m2/1.000 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 55.894.875.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 826 m2/244 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 30.958.830.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **3.756.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
771.000.000
2. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
1.564.000.000
3. MOBIL, LEXUS MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
1.421.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **2.376.604.785**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **105.786.309.785**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **105.786.309.785**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : RUI F.G.P. DUARTE
NIK : 3175052801720002
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : INSPEKTORAT JENDERAL
Sub Unit Kerja : INSPEKTORAT JENDERAL
Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 30 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUI F.G.P. DUARTE
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 755230

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **10.027.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 5.715.000.000
2. Tanah Seluas 1.250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1.660 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 1.220.000.000
5. Tanah Seluas 1.059 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 60.500.000
7. Tanah Seluas 2.200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
8. Tanah Seluas 1.162 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 117.000.000
9. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.575.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 821.500.000

1. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, LAINNYA Rp. 380.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU XENIA X AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI, WARISAN, Rp. 118.000.000
6. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 11.672.877.990

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 22.521.877.990

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 22.521.877.990

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SUPO DWI DIANTARA
NIK : 3174041403710003
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : BADAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
PERTAHANAN
Sub Unit Kerja : BADAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
PERTAHANAN
Jabatan : KEPALA BADAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 6 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUPO DWI DIANTARA**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **801629**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.418.614.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/197 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 1.516.000.000
2. Tanah Seluas 1.624 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 163.200.000
3. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 82.600.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/127 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.021.000.000
5. Tanah Seluas 698 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 141.100.000
6. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 261.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/40 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 106.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 2.127.714.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 692.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2023, HADIAH Rp. 20.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA LISTRIK GT GE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
6. MOTOR, GREENTECH AERO Tahun 2024, HADIAH Rp. 5.000.000
7. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.853.193.076
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.981.057.076
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.981.057.076

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ROBI HERBAWAN
NIK : 3175051708710008
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI INTELIJEN
PERTAHANAN
Sub Unit Kerja : BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI INTELIJEN
PERTAHANAN
Jabatan : KEPALA BADAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 2 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI INTELIJEN PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROBI HERBAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **895282**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.227.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/141 m2 di KAB / KOTA GOWA, Rp. 90.000.000		
2. Tanah Seluas 75.000 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, Rp. 187.500.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 4.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.020.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000		
2. MOTOR, TOYOTA ALPHARD Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	325.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	385.155.612
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.957.655.612
III. HUTANG	Rp.	1.750.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.207.655.612



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ARIF HARNANTO
NIK : 3515161811680004
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Kerja : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jabatan : KEPALA BADAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 27 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF HARNANTO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 712906

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/320 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000		
2. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	675.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.589.115.919
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.520.000.000
Sub Total	Rp.	9.564.115.919
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.564.115.919

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : KETUT GEDE WETAN PASTIA
NIK : 5102051908700003
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTAHANAN
Sub Unit Kerja : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTAHANAN
Jabatan : KEPALA BADAN
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 3 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KETUT GEDE WETAN PASTIA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 885378

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.470.000.000
1. Tanah Seluas 3.190 m2 di KAB / KOTA BULELENG, Rp. 330.000.000		
2. Tanah Seluas 8.370 m2 di KAB / KOTA BULELENG, Rp. 860.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	57.250.000
1. MOTOR, HONDA NF125 (KARISMA) Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	70.500.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.895.160.522
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.492.910.522
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.492.910.522

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : H. HARIS HARYANTO
NIK : 3175081704680005
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
Sub Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 12 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. HARIS HARYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 433569

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.998.590.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 952.572.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , Rp. 1.785.008.000		
3. Tanah Seluas 1.057 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 60.570.000		
4. Tanah Seluas 4.144 m2 di KAB / KOTA NGAWI, Rp. 200.440.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	995.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
3. MOBIL, NISSAN NISSAN SERENA SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
4. MOBIL, MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.601.410.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.595.000.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.595.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : YUDHI HERMAWAN
NIK : 3201022206730009
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
Sub Unit Kerja : DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERTAHANAN
Jabatan : DIREKTUR
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 24 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDHI HERMAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 1023605

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/119 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/261 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	200.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.642.940
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.007.642.940
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.007.642.940

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : TORO DJULIANTO
NIK : 3276090607670003
Lembaga : KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Kerja : UNIVERSITAS PERTAHANAN
Sub Unit Kerja : LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU
Jabatan : SEKRETARIS LEMBAGA
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 1 Maret 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PERTAHANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TORO DJULIANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS LEMBAGA**
3. NHK : **977287**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.393.589.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 264.425.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 43 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 149.537.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 75.222.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 155.916.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 271 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 972.100.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 786.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 298.389.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/209 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 692.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 303.300.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER G VNT 2.4 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, CJ 7 JEEP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOTOR, BENELLI PATAGONIAN 250 Tahun 2021, HASIL



SENDIRI	Rp. 21.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp. 10.800.000		
5. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp. 16.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	----
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	12.716.977
F. HARTA LAINNYA		Rp.	25.000.000
Sub Total		Rp.	3.734.605.977
III. HUTANG		Rp.	322.650.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	3.411.955.977

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.